

KRITIK NABI MIKHA TERHADAP NEPOTISME: PERSPEKTIF HERMENEUTIKA TEOLOGI KEADILAN SOSIAL

Saut Maruli P. Panggabean, Regueli Daeli, Iman Kristina Halawa*

Sekolah Tinggi Teologi Arastamar, Bengkulu
email korespondensi: imankristinahalawasttab@gmail.com*

Diterima tanggal: 18-12-2025

Dipublikasikan tanggal: 29-12-2025

Abstract. *This article examines the Prophet Micah's critique of nepotism through the lens of social justice theological hermeneutics. The historical background of eighth-century BCE Judah reveals systemic abuses of power, land confiscation, and political patronage that undermined the social order. Micah exposes this corruption through sharp prophetic rhetoric, portraying leaders as betrayers of their divine mandate. This analysis finds that modern nepotism shares structural similarities with the injustices of Micah's era, namely the erosion of meritocracy and the weakening of social solidarity. The novelty of this research lies in positioning nepotism as an independent theological category within the interpretation of the Book of Micah. The research results affirm that the struggle against nepotism encompasses three crucial dimensions: (1) as an ethical agenda in social life; (2) as a prophetic calling to embody God's justice (*mishpat*) in the public sphere; and (3) as a theological calling to restore the integrity of public spirituality centered on faith loyalty and the rejection of exclusive privileges. Consequently, this article grounds Micah's message as an instrument of socio-political transformation relevant to the context of modern leadership in Indonesia.*

Keywords: *Micah, nepotism, hermeneutics, social justice, contextual theology*

Abstrak. Artikel ini mengkaji kritik Nabi Mikha terhadap praktik nepotisme melalui pendekatan hermeneutika teologi keadilan sosial. Latar historis Yehuda abad ke-8 SM menyingkap penyalahgunaan kekuasaan, perampasan tanah, dan patronase politik yang secara sistemik merusak tatanan sosial. Mikha menyingkap korupsi tersebut melalui retorika profetis tajam yang menggambarkan para pemimpin sebagai pengkhianat mandat ilahi. Analisis ini menemukan bahwa nepotisme modern memiliki kesamaan struktural dengan ketidakadilan pada masa Mikha, yaitu pengikisan meritokrasi dan pelemahan solidaritas sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemosisian nepotisme sebagai kategori teologis tersendiri dalam tafsir Kitab Mikha. Hasil penelitian menegaskan bahwa perjuangan melawan nepotisme mencakup tiga dimensi utama: (1) agenda etis dalam kehidupan sosial; (2) panggilan profetis untuk mewujudkan keadilan Allah (*mishpat*) di ruang publik; dan (3) panggilan teologis untuk memulihkan integritas spiritualitas publik yang berpusat pada kesetiaan iman dan penolakan terhadap hak istimewa eksklusif. Artikel ini menegaskan pesan Mikha sebagai instrumen transformasi sosial-politik yang relevan bagi kepemimpinan modern di Indonesia

Kata kunci: Mikha, nepotisme, hermeneutika, keadilan sosial, teologi kontekstual

PENDAHULUAN

Isu keadilan sosial merupakan tema sentral dalam banyak teks kenabian Perjanjian Lama, dan Nabi Mikha tampil sebagai salah satu suara profetis paling keras dalam mengecam struktur sosial yang timpang di Yehuda abad ke-8 SM. Pada

masa Raja Yotam, Ahas, dan Hizkia (Mikha 1:1), Yehuda menghadapi tekanan eksternal dari Asyur sekaligus ketidakadilan internal berupa korupsi, penindasan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Para pemimpin memperlakukakan jabatan demi kepentingan pribadi dan kelompok dekat mereka. Fenomena ini dalam istilah modern disebut nepotisme.

Kritik Mikha tidak hanya bersifat etis, tetapi juga teologis, karena menyentuh relasi umat dengan Allah yang berlandaskan *מִשְׁפָּט* (*mishpat*, keadilan sosial) dan *חֶסֶד* (*chesed*, kasih setia dan solidaritas) (Simundson et al. 2005). Kedua istilah ini mencerminkan karakter Allah yang menuntut keadilan konkret dan relasi sosial yang penuh kasih antarumat. Dalam konteks itu, Mikha menegur para pemimpin Yehuda yang menyelewengkan mandat keadilan dan merusak tatanan sosial masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial bangsa Israel di era Nabi Mikha mengalami praktik ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan (nepotisme) dari para pemimpin Yehuda sehingga masyarakat tidak mendapatkan keadilan sosial. Nabi Mikha menyuarakan bahwa pentingnya keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati di hadapan Allah (Mikha 6:8). Kritik tajam Nabi Mikha menegaskan bahwa nilai-nilai kerohanian seorang pemimpin belum tampak nyata.

Secara historis, praktik penyalahgunaan kekuasaan di Yehuda kerap dilegitimasi melalui jaringan patronase politik dan relasi keluarga. Penafsiran Allen terhadap Mikha 2:1-2 menegaskan bahwa praktik perampasan tanah oleh para elit bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap teologi kovenan. Allen menekankan bahwa rencana jahat yang disusun 'di tempat tidur'

menunjukkan niat yang disengaja untuk mengeksploitasi kekuasaan demi keuntungan pribadi dan keluarga. Hal ini mencerminkan bagaimana struktur sosial telah dirusak oleh keserakahan yang dilegalkan, di mana hak-hak orang miskin dikorbankan demi perluasan aset kelompok elit, sebuah tindakan yang secara langsung menentang keadilan sosial yang dikehendaki Tuhan (Allen 1976).

Pendekatan hermeneutika teologi keadilan sosial memungkinkan pembacaan teks Mikha secara kontekstual dan kritis terhadap praktik nepotisme masa kini. Menurut Brueggemann, hermeneutika profetis merupakan *counter-discourse* terhadap ideologi penindasan dan menegaskan keberpihakan Allah kepada kaum tertindas (Brueggemann 2018). Dengan prinsip “membaca dari bawah,” teks Mikha dapat ditafsirkan sebagai panggilan profetis bagi masyarakat modern untuk menolak ketidakadilan struktural, termasuk nepotisme dalam ranah politik dan lembaga keagamaan

Kehadiran Mikha dalam menyuarakan keadilan kepada para pemimpin masyarakat Yehuda, mengintegrasikan antara pemimpin dengan yang dipimpin harus saling mengasihi serta berlaku adil. Kemudian Mikha juga menyuarakan kepada masyarakat Yehuda bahwa Tuhan menghendaki bahwa kehidupan suatu bangsa, kota hendaknya hidup bijaksana dan hidup takut akan Tuhan (Mikha 6:9).

Allen menyoroti bahwa Mikha berbicara dari perspektif orang desa yang melihat langsung bagaimana elite kota merampas hak-hak rakyat kecil. Allen menafsirkan Mikha 2:1-2 sebagai kecaman terhadap para penguasa yang “bermalam dengan rencana jahat di atas tempat tidurnya” untuk keesokan harinya merampas tanah rakyat dengan kekuasaan hukum yang dimanipulasi (Allen 1976).

Meski Allen tidak menggunakan istilah nepotisme, praktik perampasan tanah dan manipulasi hukum itu erat kaitannya dengan sistem patronase keluarga dan kelompok dekat yang mendukung elite berkuasa. John mengomentari bahwa Mikha juga menekankan aspek sosial-ekonomi, Ia menyebut bahwa perampasan tanah oleh elite bukan sekadar kejahatan individual, tetapi kejahatan struktural yang melibatkan jaringan keluarga, hakim, dan nabi bayaran yang semuanya bekerja sama memperkuat posisi elite (Smith 1984). Dalam bahasa kontemporer, ini adalah bentuk nepotisme sistemik, ketika hubungan kekeluargaan dan jaringan pribadi dipakai untuk menindas keadilan publik.

Dari perspektif hermeneutik, membaca teks Mikha dalam konteks teologi keadilan sosial berarti tidak berhenti pada penjelasan historis, tetapi melanjutkan pada pertanyaan etis: bagaimana pesan profetis ini berbicara kepada praktik nepotisme hari ini? Hermeneutika keadilan sosial menekankan prinsip “membaca dari bawah”, yakni membaca Alkitab dari perspektif orang miskin dan tertindas. Dengan cara ini, kritik Mikha terhadap elite Yehuda dapat dimaknai sebagai kritik terhadap struktur nepotisme kontemporer yang menghalangi akses orang biasa terhadap keadilan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Kritik Nabi Mikha menekankan dan sekaligus memberikan informasi bahwa fenomena penyalahgunaan kekuasaan terjadi juga di era modern, yakni agama dapat diperalat untuk memperkuat kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu (Simundson et al. 2005). Kritik Nabi Mikha terhadap ketidakadilan sosial menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Kritikan Nabi Mikha tidak hanya mengkritik para pemimpin dalam penyalahgunaan tanah, kekuasaan, dan sumber daya, tetapi Nabi Mikha juga menegur kemerosotan spiritual, sosial, ekonomi pada masyarakat Yehuda (Mikha 2:1-2; 3:1-3). Sipahutar menyoroti janji tanah kepada Abraham sebagai simbol keadilan, yang dikhianati ketika tanah dikuasai oleh segelintir elite. Praktik tersebut diperkuat oleh patronase politik yang mirip dengan nepotisme (Sipahutar 2019; Putra 2024). Dalam Mikha 2:1-2 terdapat kecaman terhadap elite yang memanipulasi hukum demi memperkaya diri dan kelompoknya (CSsR, 2014.). Nepotisme dapat dipahami sebagai bentuk favoritisme struktural yang nyata dan mengorbankan rakyat kecil. Selain itu, nepotisme juga memperlihatkan adanya sikap egoisme yang diterapkan oleh para pemimpin kepada masyarakat.

Meskipun istilah “nepotisme” tidak dikenal dalam Alkitab, perilaku pemimpin yang memanipulasi hukum demi kepentingan keluarga atau kerabat jelas mencerminkan fenomena tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan seorang pemimpin memperlihatkan kemerosotan spiritualnya (Putra 2024). Kepemimpinan yang korup dan nepotis merupakan bentuk nyata dari ketidaktaatan terhadap hukum Taurat, yang memberikan jaminan perlindungan bagi kaum lemah. Alih-alih menegakkan *mishpat* (keadilan hukum) dan *tsedaqah* (kebenaran sosial) yang menjadi inti dari pengajaran Taurat, para pemimpin ini justru memanipulasi struktur hukum untuk melanggengkan kekuasaan dinasti mereka, yang pada hakekatnya adalah pemberontakan terhadap otoritas kedaulatan Tuhan atas bangsa itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kritik Nabi Mikha terhadap praktik nepotisme melalui perspektif

hermeneutika teologi keadilan sosial serta mengungkap relevansi pesan profetis Mikha bagi konteks sosial-politik masa kini. Penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan melawan nepotisme bukan hanya persoalan etika sosial, melainkan juga panggilan teologis untuk mewujudkan keadilan Allah dalam kehidupan publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini memperlakukan nepotisme sebagai kategori teologis yang berdiri sendiri dalam tafsir Kitab Mikha, bukan sekadar bagian dari wacana korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan secara umum. Kedua, pendekatan hermeneutika teologi keadilan sosial digunakan untuk membaca ulang teks Mikha secara kontekstual, sehingga pesan profetisnya dapat berbicara ke dalam realitas sosial-politik masa kini. Ketiga, penelitian ini menghadirkan kontribusi teologi kontekstual Indonesia dengan menautkan kritik Mikha terhadap elite Yehuda dengan praktik nepotisme dalam kepemimpinan modern di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa perlawanan terhadap nepotisme merupakan bagian dari panggilan profetis untuk mewujudkan keadilan Allah di ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-teologis dengan kerangka hermeneutika teologi keadilan sosial sebagai pisau analisis utama. Hermeneutika dipahami bukan hanya sebagai seni menafsirkan teks, tetapi juga sebagai proses teologis untuk membaca ulang pesan Alkitab secara kritis terhadap realitas sosial masa kini. Pendekatan ini memungkinkan Kitab Mikha dibaca bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan sebagai suara profetis yang menegur struktur

ketidakadilan kontemporer, termasuk praktik nepotisme dalam konteks sosial-politik modern.

Sumber data utama penelitian ini adalah teks Kitab Mikha dalam bahasa Ibrani sebagaimana terdapat dalam *Biblia Hebraica Stuttgartensia*. Fokus kajian diarahkan pada pasal-pasal yang memuat kritik sosial Nabi Mikha, khususnya Mikha 2:1-2; 3:1-3; dan 3:9-11, yang menyingkap penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, serta perampasan hak-hak rakyat kecil. Teks-teks tersebut ditafsirkan melalui langkah-langkah hermeneutika yang mencakup: pembacaan historis untuk memahami konteks sosial Yehuda abad ke-8 SM; analisis teologis terhadap konsep *mishpat* (keadilan) dan *chesed* (kasih setia); serta penerapan prinsip hermeneutika keadilan sosial untuk mengaitkan makna teks dengan praktik nepotisme kontemporer.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan makna asli teks lalu menafsirkan ulang secara kontekstual. Dengan demikian, metode ini tidak berhenti pada pemaparan makna masa lampau, tetapi bergerak menuju penerapan profetis bagi konteks masa kini. Sebagaimana ditekankan oleh Brunner (1952) dan Brueggemann (2018), pembacaan profetis harus berfungsi sebagai *counter-discourse* terhadap sistem yang menindas. Dalam semangat ini, penelitian ini berupaya menghidupkan kembali suara kenabian Mikha sebagai inspirasi bagi perjuangan melawan nepotisme dalam kehidupan publik modern.

Dengan demikian, metode penelitian ini menempatkan hermeneutika teologi keadilan sosial bukan sekadar sebagai perangkat analisis, tetapi sebagai pendekatan profetis yang menghubungkan teks suci dengan realitas sosial. Tujuan

akhirnya adalah menegaskan bahwa penafsiran Kitab Mikha memiliki relevansi etis dan teologis dalam membangun budaya kepemimpinan yang adil, transparan, dan bebas nepotisme di konteks Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme merupakan bentuk kontemporer dari ketidakadilan struktural yang dikritik Nabi Mikha di Yehuda abad ke-8 SM. Melalui analisis hermeneutika teologi keadilan sosial, ditemukan bahwa perampasan tanah dan penyalahgunaan kekuasaan pada masa itu memiliki kesamaan struktural dengan nepotisme modern. Keduanya merusak sistem meritokrasi, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan solidaritas kemasyarakatan.

Mikha menggunakan retorika profetis yang provokatif, seperti metafora kanibalisme politik, untuk menyingkap bahwa kekuasaan yang seharusnya melindungi rakyat telah berubah menjadi sistem predatori yang mengeksploitasi kaum lemah demi kepentingan pribadi dan kelompok. Penelitian ini juga menegaskan bahwa korupsi yang terjadi bersifat sistemik dan institusional, di mana lembaga hukum serta keagamaan sering kali melegitimasi praktik penindasan tersebut.

Sebagai kontribusi teologis, penelitian ini adalah memosisikan perlawanan terhadap nepotisme bukan hanya sebagai masalah etika administrasi, melainkan sebagai dosa struktural yang menuntut respons profetis nyata. Kajian ini merumuskan tiga dimensi utama dalam perjuangan melawan nepotisme: pertama, agenda etis untuk membangun tatanan sosial yang transparan; kedua, panggilan

profetis untuk mengaktualisasikan keadilan Allah (*mishpat*) di ruang publik; dan ketiga, panggilan teologis untuk memulihkan integritas spiritualitas publik yang menolak hak istimewa (*privilege*) eksklusif dan berpusat pada kesetiaan iman.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini memanggil gereja dan para pemimpin publik untuk bertransformasi menjadi komunitas profetis yang berani menegakkan kebenaran serta mengimplementasikan kepemimpinan yang berlandaskan pada integritas dan solidaritas demi mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah masyarakat.

PEMBAHASAN

Kritik Sosial Nabi Mikha

Kitab Mikha pasal 2 menyingkap praktik perampasan tanah oleh elite Yehuda abad ke-8 SM. Mikha 2:1-2 menyatakan: *“Celakalah orang-orang yang merancang kejahatan, yang merencanakan kejahatan di ranjang mereka! Apabila pagi hari merekah, dilaksanakannya juga, sebab hal itu ada dalam kekuasaan tangannya. Apabila mereka mengingini ladang-ladang, dirampaslah itu, dan apabila mereka mengingini rumah-rumah, diambilnya itu; mereka menindas orang dengan rumahnya, demikian juga dengan orang itu sendiri beserta milik pusaknya.”*

Ayat ini menggambarkan bagaimana penguasa menggunakan kedudukan politik dan hukum untuk merampas tanah rakyat kecil. Hal ini bertentangan dengan tradisi hukum Israel yang menegaskan bahwa tanah merupakan warisan keluarga yang tidak boleh dipindahkan secara sewenang-wenang (Imamat 25:23). Dengan

demikian, Mikha mengecam penyalahgunaan kekuasaan yang merusak struktur keadilan masyarakat perjanjian.

Para penafsir seperti Ademiluka dan Boloje menekankan bahwa perampasan tanah mencerminkan ketidakadilan ekonomi serupa dengan praktik *land grabbing* modern. Sipahutar menambahkan bahwa tanah bukan hanya aset ekonomi melainkan simbol identitas teologis. Ketika tanah dirampas, relasi perjanjian dengan Allah pun terganggu. Kritik Mikha ini relevan dengan nepotisme modern, di mana jabatan publik dan akses ekonomi sering dikuasai oleh lingkaran keluarga atau dinasti politik (Boloje 2019; Sipahutar 2019; Ademiluka 2023).

Permasalahan distribusi tanah menjadi pusat kritik profetis Mikha. Janji tanah yang diberikan kepada Abraham sebagai simbol keadilan Allah telah dikhianati oleh praktik akumulasi kekayaan segelintir elite. Maka, nubuat Mikha menjadi bentuk protes profetis terhadap pembalikan janji Allah yang seharusnya menjamin keadilan bagi semua umat (Pardede, Lumingkewas, and Simangunsong 2023). Dengan demikian, kritik Mikha terhadap perampasan tanah memiliki relevansi langsung dengan isu nepotisme modern. Jika pada zaman Mikha tanah diwariskan kepada keluarga elite dan diperkuat dengan rekayasa hukum, maka pada zaman sekarang nepotisme bekerja dengan logika serupa: jabatan publik, akses ekonomi, dan sumber daya negara dipusatkan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Dalam perspektif hermeneutika teologi keadilan sosial, pesan Mikha mengingatkan bahwa setiap bentuk konsentrasi kekuasaan yang menyingkirkan hak rakyat kecil adalah pengkhianatan terhadap *mishpat* (keadilan) Allah.

Kritik sosial Nabi Mikha dalam pasal 2 dapat dipahami sebagai sorotan tajam terhadap praktik konsentrasi kekuasaan yang dilakukan oleh elite Yehuda abad ke-8 SM. Dalam teks Mikha 2:1-2, para penguasa dan pemilik modal digambarkan sebagai pihak yang merancang kejahatan pada malam hari dan melaksanakannya pada pagi hari ketika kesempatan terbuka. Bentuk kejahatan itu diwujudkan dalam perampasan tanah dan rumah milik rakyat kecil, sebuah tindakan yang tidak hanya menindas secara ekonomi, tetapi juga mengguncang fondasi teologis masyarakat Israel. Tanah dalam tradisi Israel bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan suci yang meneguhkan identitas sebagai umat Allah (Im 25:23). Karena itu, perampasan tanah berarti perampasan hak asasi religius dan kultural.

Menurut Boloje tindakan ini dapat disebut sebagai “perompakan ekonomi” (*economic piracy*), sebab para elite secara sistematis menciptakan mekanisme legal maupun politis untuk memindahkan hak rakyat kecil kepada diri mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa dosa ini bersifat kolektif, dilakukan oleh kelas berkuasa dengan tujuan mengamankan kepentingan ekonomi mereka sendiri, dan akibatnya solidaritas sosial bangsa hancur serta martabat rakyat miskin terinjak (Boloje 2019). Hal yang sama dikemukakan Ademiluka, yang melihat fenomena perampasan tanah dalam Mikha sebagai bentuk *land grabbing* kuno, di mana rakyat dipaksa menyerahkan hak mereka melalui rekayasa kekuasaan. Ia bahkan mengaitkannya dengan fenomena politik modern, dimana elite menggunakan segala cara untuk mempertahankan kendali mereka atas sumber daya publik (Ademiluka 2023).

Perampasan tanah pada masa Mikha mencerminkan pengambilalihan sumber daya fisik, sedangkan nepotisme politik di Indonesia kontemporer dapat

dipahami sebagai bentuk perampasan struktural dalam distribusi jabatan dan akses ekonomi.” Jabatan publik, proyek negara, dan akses ekonomi seringkali dikuasai oleh lingkaran keluarga atau dinasti politik. Dengan demikian, terdapat kesamaan struktur antara kritik Mikha terhadap Yehuda dan fenomena nepotisme kontemporer. Keduanya sama-sama menyingkap bagaimana elite menggunakan kekuasaan untuk memusatkan sumber daya pada lingkaran sempit, sementara rakyat kecil kehilangan hak-hak dasarnya. Pada masa Mikha, rakyat kehilangan tanah yang menjadi identitas sosial dan religius mereka; pada masa kini, rakyat kehilangan akses pada meritokrasi dan keadilan sosial karena jabatan didistribusikan berdasarkan hubungan kekerabatan. Sipahutar menekankan bahwa kehilangan tanah dalam Mikha identik dengan hilangnya relasi umat dengan Allah, sebab tanah adalah simbol warisan perjanjian (Sipahutar 2019). Secara paralel, nepotisme modern mengikis legitimasi moral negara, karena rakyat kehilangan kepercayaan bahwa negara sungguh-sungguh menjalankan fungsi sebagai penyelenggara keadilan.

Dengan membaca Mikha 2 melalui kacamata hermeneutika keadilan sosial, kita dapat melihat bahwa pesan profetis ini melampaui konteks historisnya dan berbicara ke dalam isu kontemporer. Nabi Mikha menghadirkan kritik terhadap sebuah sistem yang secara struktural menyingkirkan rakyat kecil, bukan hanya terhadap perilaku individu. Tafsir ini menegaskan bahwa nepotisme, sama seperti perampasan tanah dalam Yehuda kuno, merupakan bentuk dosa struktural yang bertentangan dengan prinsip *mishpat* (keadilan) dan *chesed* (kasih setia) Allah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kritik Mikha sebagai seruan profetis

yang relevan untuk membongkar praktik-praktik kekuasaan yang timpang dalam masyarakat modern.

Retorika Profetis

Mikha menggunakan retorika tajam untuk menyingkap ketidakadilan. Dalam Mikha 3:1–3, para pemimpin digambarkan sebagai algojo yang “mencabut kulit” dan “memakan daging umat.” Metafora kanibalisme politik ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk predatorisme sosial. Pemimpin yang seharusnya melindungi rakyat justru mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi.

Konsekuensi tatkala seorang pemimpin lebih mengedepankan egoisme, maka akan merusak kesejahteraan lembaga atau organisasi yang sedang dipimpin. Itu sebabnya Mikha menentang para pemimpin Yehuda dan juga nabi-nabi palsu di Yehuda, karena mereka tidak berlaku adil kepada rakyat kecil, justru mereka bersikap nepotisme. Seorang pemimpin seharusnya membimbing bawahannya untuk melakukan kebenaran, tetapi pada masa Mikha justru para pemimpin Yehuda, hidup dalam penyembahan berhala dan tidak lagi taat kepada Allah.

Retorika keras ini berfungsi sebagai strategi profetis untuk mengguncang kesadaran moral masyarakat. Setiap praktik yang menindas rakyat sama dengan menolak kehadiran Allah dalam sejarah. Dengan demikian, kritik Mikha bukan sekadar moralitas, melainkan deklarasi teologis bahwa Allah berpihak pada kaum tertindas (Rangkang et al. 2025). Allah memiliki sifat yang adil sehingga Ia tidak mungkin melepaskan orang yang berlaku tidak adil terutama kepada mereka yang menindas orang lain, curang dan tidak peduli kepada sesama manusia. Namun

meskipun Allah memiliki sifat yang adil, Allah juga memiliki sifat kasih dengan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat (Mikha 6:8).

Dalam Mikha 3:9–11, kritik semakin diarahkan pada para hakim, imam, dan nabi palsu yang seharusnya menjadi pilar moral dan spiritual masyarakat. Namun kenyataannya, mereka justru menjual keadilan demi suap, mengajar demi upah, dan bernubuat demi uang. Retorika ini menunjukkan adanya sistem yang korup di mana lembaga hukum dan keagamaan tidak lagi menjalankan fungsi sakralnya, melainkan telah menjadi instrumen eksploitasi. Ompong menekankan bahwa nubuat Mikha di bagian ini menyingkapkan bentuk korupsi struktural yang merusak seluruh sendi kehidupan sosial, sehingga keadilan tidak lagi dapat diakses oleh rakyat kecil (Ompong 2024). Kritikan Nabi Mikha terhadap ketidakadilan para pemimpin Yehuda merupakan inspirasi dari Allah untuk menyatakan kebenaran bahwa manusia diciptakan untuk saling mengasihi tanpa memandang jabatan atau gelar yang disandang.

Nepotisme seringkali ditopang oleh jaringan hukum, agama, atau budaya yang seharusnya mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan, namun justru ikut melanggengkannya. Sama seperti para hakim dan nabi palsu dalam Mikha, lembaga-lembaga modern dapat tergoda untuk membungkus praktik nepotisme dengan legitimasi formal atau bahkan religius. Dalam hal ini, retorika Mikha menyingkap lapisan kemunafikan yang menyertai penyalahgunaan kekuasaan: di balik bahasa hukum atau doa-doa religius, sering tersembunyi kepentingan pribadi dan keluarga. Nabi Mikha mengkritik nepotisme karena para pemimpin Israel memperlakukan rakyat dengan tidak adil, sehingga menimbulkan kesenjangan

sosial. Kritik Nabi Mikha kepada para pemimpin kaum Israel, bertujuan supaya mereka tidak menyalahkan kekuasaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka untuk menertibkan kehidupan suatu bangsa. Dibalik tantangan yang disuarakan Nabi Mikha kepada para pemimpin kaum Israel yang tidak berlaku adil kepada masyarakat, adanya peringatan akan penghakiman Allah kepada orang yang tidak mendengarkan dan melakukan firman-Nya.

Waltke dalam komentarnya tentang Mikha menekankan bahwa retorika profetis ini tidak sekadar berfungsi sebagai kritik moral, tetapi juga sebagai deklarasi teologis. Menurutnya, dengan menggunakan gambaran kanibalisme sosial, Mikha sedang mengingatkan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk perlawanan terhadap Allah sendiri, sebab Allah identik dengan keadilan dan kasih setia (Waltke 2008). Retorika yang keras ini pada dasarnya adalah strategi kenabian untuk membangkitkan empati sekaligus kemarahan moral, agar masyarakat tidak lagi tinggal diam di hadapan praktik ketidakadilan. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi Mikha di Yehuda bukan hanya ketidakadilan sosial para pemimpin kaum Yehuda, tetapi juga adanya penyembahan berhala ditengah-tengah umat Tuhan serta kemerosotan moral keluarga Israel (Mikha 5: 11-13; 7:6).

Dengan demikian, retorika profetis Mikha berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai senjata moral untuk membongkar wajah asli penyalahgunaan kekuasaan. Ia memperlihatkan bahwa nepotisme dan segala bentuk korupsi bukan sekadar penyimpangan administratif, tetapi tindakan predatorial yang melukai tubuh sosial umat. Melalui bahasa yang provokatif dan mengguncang,

Mikha menghadirkan Allah sebagai Hakim yang berdiri di pihak rakyat kecil dan menentang segala bentuk kekuasaan yang disalahgunakan. Dengan kerangka hermeneutika keadilan sosial, teks ini mengingatkan gereja dan masyarakat modern bahwa kritik terhadap nepotisme bukan sekadar agenda etis, melainkan panggilan profetis untuk membela kehidupan dan martabat manusia. Keterlibatan gereja membela keadilan sosial beranjak pada bingkai di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.

Nepotisme sebagai Korupsi Struktural

Dalam nubuat Mikha penyalahgunaan kekuasaan digambarkan secara tajam melalui retorika profetis, maka akar persoalan yang lebih dalam dapat dipahami sebagai korupsi struktural. Mikha melihat bahwa kejahatan sosial di Yehuda bukanlah perbuatan individu semata, melainkan praktik kolektif yang merasuki sistem pemerintahan, hukum, dan agama. Nepotisme dalam konteks modern memiliki corak yang sama: ia bukan sekadar keberpihakan emosional seorang pemimpin terhadap keluarga, melainkan pola sistematis yang mengatur distribusi kekuasaan dan sumber daya secara tidak adil.

Dalam Mikha 3:9–12, para pemimpin digambarkan “membangun Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kejahatan.” Kritik ini menunjukkan bahwa korupsi bersifat institusional, di mana hukum, agama, dan ekonomi bekerja sama melanggengkan ketidakadilan. Nepotisme dapat dipahami sebagai wajah kontemporer dari korupsi struktural yang dikritik Mikha (Choi 2021).

Korupsi berarti mencuri hak orang lain serta melanggar hukum Allah. Dan itulah yang diserukan oleh Nabi Mikha kepada para pemimpin Yehuda supaya

mereka bertobat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemimpin. Hal yang menarik yang Mikha tegaskan ialah ia berani menyatakan kebenaran Allah kepada mereka yang memiliki sikap nepotisme dan juga menyuarakan pertobatan dari penyembahan berhala di tanah Yehuda.

Silalahi juga menekankan bahwa korupsi yang dihadapi Mikha bersifat sistemik, di mana para hakim, imam, dan nabi palsu bekerja sama dalam jejaring kepentingan yang eksploitatif (Silalahi 2024). Kondisi ini sangat paralel dengan nepotisme modern, dimana jaringan keluarga atau kekerabatan sering menjadi pintu masuk utama bagi akses terhadap jabatan publik dan proyek pembangunan. Dalam perspektif hermeneutika teologi keadilan sosial, hal ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial dapat dimanipulasi untuk memperkaya segelintir orang, sementara mayoritas rakyat justru menjadi korban. Nepotisme sebagai korupsi struktural menimbulkan konsekuensi serius terhadap integritas institusi publik. Praktik nepotisme di Indonesia, yang sering kali bermanifestasi dalam fenomena dinasti politik di tingkat lokal maupun nasional, menunjukkan bahwa pola hubungan patron-klien dalam birokrasi memperlemah sistem meritokrasi. Pengisian jabatan publik yang didasarkan pada hubungan darah atau kekerabatan—bukan pada kompetensi—secara sistematis menutup ruang bagi profesional berbakat, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Fenomena ini mencerminkan apa yang dikritik Mikha sebagai upaya para elit untuk mengamankan sumber daya publik bagi lingkaran mereka sendiri, sehingga negara tidak lagi berfungsi sebagai penyelenggara keadilan, melainkan sebagai instrumen pelestarian kekuasaan keluarga (Tory and

Hanum 2025). Jika dikaitkan dengan Mikha, konsekuensi ini mirip dengan gambaran Yerusalem yang dibangun di atas darah: institusi yang seharusnya menjadi pusat keadilan malah berubah menjadi instrumen penindasan.

Dalam bingkai retorika profetis, Mikha menyingkapkan bahwa struktur yang korup bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga teologis. Struktur yang menindas menandakan absennya Allah dari pusat kehidupan bangsa, sebab Allah hadir hanya di mana ada keadilan. Oleh karena itu, nepotisme tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah etika administrasi, tetapi sebagai dosa publik yang merusak relasi dengan Allah dan sesama. Perspektif ini sejalan dengan refleksi Rangkang, dkk yang menegaskan bahwa keadilan sosial dalam nubuat Mikha adalah tanda kehadiran Allah, sementara ketidakadilan struktural adalah bentuk penolakan terhadap-Nya (Rangkang et al. 2025). Jika kita menarik paralel dengan konteks Indonesia kontemporer, nepotisme sering dianggap “biasa” atau “wajar” dalam praktik politik. Namun, perspektif Mikha mengingatkan bahwa ketika nepotisme menjadi pola struktural, ia berfungsi sama seperti penindasan Yehuda kuno: menciptakan kesenjangan, memperlemah solidaritas sosial, dan menyingkirkan kelompok lemah dari akses terhadap keadilan. Dengan demikian, tugas teologi keadilan sosial adalah membongkar legitimasi palsu yang menopang nepotisme, serta menghadirkan kembali visi Allah tentang masyarakat yang berpusat pada keadilan, bukan pada *privilege* keluarga.

Relevansi Hermeneutik

Pendekatan hermeneutika teologi keadilan sosial memberi kerangka pembacaan Kitab Mikha yang tidak berhenti pada aspek historis atau teoretis,

melainkan menuntun kepada tindakan etis di ranah publik. Melalui pendekatan ini, nubuat Mikha dipahami sebagai suara profetis yang hidup menegur, membongkar, sekaligus mengarahkan masyarakat untuk membangun sistem sosial yang berkeadilan. Prinsip “membaca dari bawah” menempatkan teks Mikha sebagai panggilan Allah kepada umat agar berpihak pada kaum tertindas dan menolak setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk nepotisme.

Pertama, hermeneutika Mikha menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan tanda kehadiran Allah dalam kehidupan publik. Dalam Mikha 3:11, para imam dan nabi palsu membungkus ketidakadilan dengan simbol-simbol religius, seolah Allah mendukung sistem yang menindas. Fenomena ini paralel dengan situasi masa kini ketika nepotisme kerap dibenarkan melalui loyalitas organisasi, kedekatan keluarga, atau bahasa religius. Brueggemann menyebut pembacaan profetis sebagai *counter-discourse* terhadap ideologi kekuasaan, yakni membaca teks Alkitab untuk menantang legitimasi moral dari sistem politik yang timpang (Brueggemann 2018). Dengan demikian, kehadiran Allah dalam ruang publik hanya nyata bila hukum dan kebijakan berpihak pada keadilan sosial.

Kedua, hermeneutika Mikha memperlihatkan bahwa penolakan terhadap nepotisme adalah bentuk kesetiaan iman dan dasar etika politik Kristen. Rossi dan Santos menegaskan bahwa dalam nubuat Mikha, keadilan sosial merupakan manifestasi kehadiran Roh Allah. Maka, pemimpin yang mempraktikkan nepotisme bukan sekadar gagal secara etika administratif, tetapi juga mengkhianati mandat teologis kepemimpinan yang bersumber dari Allah (Mayopu and Simanjuntak 2025). Dalam konteks etika politik Indonesia, hal ini menuntut reformasi moral

dalam kepemimpinan publik: jabatan harus diisi berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan kekerabatan atau relasi patronase. Dengan demikian, penelitian ini memberi sumbangan praktis bagi etika politik profetis yakni model kepemimpinan yang meneladani Allah yang adil dan setia.

Ketiga, hermeneutika Mikha memberi arah bagi pengembangan teologi publik yang relevan dengan konteks Indonesia. Nubuat Mikha menunjukkan bahwa iman tidak boleh terkurung dalam ruang ibadah, tetapi harus menjelma menjadi aksi sosial yang membela keadilan. Wang menekankan bahwa hermeneutika profetis harus bertransformasi menjadi praksis keadilan yang nyata (Wang 2015). Berdasarkan prinsip ini, gereja dan lembaga teologi di Indonesia perlu menegaskan diri sebagai “komunitas profetis” yang berani menyuarakan kebenaran terhadap sistem nepotistik dalam birokrasi, pelayanan, maupun pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi bagi teologi publik melalui pengembangan etika sosial yang berbasis iman menjadikan keadilan sebagai wujud spiritualitas publik.

Keempat, hermeneutika Mikha membentuk visi profetis tentang kepemimpinan Kristen yang menolak *privilege* dan menghidupi prinsip meritokrasi. Mikha 6:8 merumuskan panggilan iman: “berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah.” Prinsip ini menjadi dasar bagi konstruksi kepemimpinan publik yang berorientasi pada pelayanan, bukan pada keuntungan pribadi atau keluarga. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan bahwa melawan nepotisme bukan sekadar agenda moral, melainkan wujud nyata

teologi keadilan sosial yang membumikan nilai Kerajaan Allah di tengah kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi praktis penelitian ini bagi etika politik dan teologi publik terletak pada pemulihan visi kenabian dalam ruang publik Indonesia. Melalui hermeneutika Mikha, gereja, akademisi, dan pemimpin Kristen dipanggil untuk menghadirkan spiritualitas publik yang profetis yakni spiritualitas yang berani menegakkan keadilan sosial sebagai perwujudan iman kepada Allah yang adil. Perjuangan melawan nepotisme, karenanya, merupakan bagian dari panggilan teologis untuk menghadirkan keadilan Allah dalam kehidupan sosial dan politik bangsa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa nepotisme merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang sejalan dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dikritik Nabi Mikha di Yehuda abad ke-8 SM. Melalui pendekatan hermeneutika teologi keadilan sosial, ditemukan kesamaan antara perampasan tanah pada masa Mikha dan nepotisme modern, yaitu pengikisan meritokrasi, pelemahan solidaritas sosial, serta konsentrasi kekuasaan.

Kritik profetis Mikha menegaskan bahwa perlawanan terhadap nepotisme bukan hanya agenda etis, melainkan panggilan profetis dan teologis untuk mewujudkan keadilan Allah (*mishpat*) di ruang publik. Nepotisme dipahami sebagai dosa struktural yang merusak integritas spiritualitas masyarakat dan menghalangi terciptanya tatanan sosial yang adil.

Dalam konteks Indonesia, pesan Mikha relevan sebagai seruan profetis bagi gereja dan para pemimpin publik untuk menolak praktik nepotisme. Kepemimpinan yang berlandaskan integritas, solidaritas, dan keadilan merupakan wujud nyata panggilan iman dalam membangun masyarakat yang transparan dan berpusat pada nilai-nilai Kerajaan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademiluka, Solomon Olusola. 2023. ““They Covet Fields and Houses ... and Seize Them’: Interpreting Micah 2:2 in Light of Economic Deprivation for Holding on to Power in Nigeria.” *Journal for Semitics* 31 (2). <https://doi.org/10.25159/2663-6573/10682>.
- Allen, Leslie C. 1976. *The Books of Joel, Obadiah, Jonah, and Micah*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Boloje, Blessing Onoriode. 2019. “Economic Piracy and Land Confiscation (Micah 2:1–5): Micah’s Portrayal of Evil-Doers, Evil-Doing, and Yahweh’s Action.” *Journal for Semitics* 28 (1). <https://doi.org/10.25159/2663-6573/5650>.
- Brunner, Emil. 1952. *The Divine Imperative*. Philadelphia: Westminster Press.
- Choi, Dongbin. 2021. *The Use and Function of Scripture in 1 Maccabees*. Library of Second Temple Studies. London New York Oxford New Delhi Sydney: T&T Clark.
- CSsR, Mateus Mali. n.d. *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. PT Kanisius.
- Mayopu, Yusup Amasia, and Yosua Marsorin Simanjuntak. 2025. “Dosa Suap Dalam Ulangan 16: 19 Dan Implikasinya Terhadap Etika Kepemimpinan Di Era Modern.” *GRAFTA: Journal of Christian Religion Education and Biblical Studies* 4 (2): 78–88.
- OMPONG, Wilhelmus. 2024. “Menilai Praktik Korupsi di Indonesia dari Perspektif Moral Kristiani.” Undergraduate, IFTK Ledalero. <http://repository.iftkledalero.ac.id/2190/>.
- Pardede, Harold, Martin Lumingkewas, and Amran Simangunsong. 2023. “TEOLOGI KEADILAN (MISHPAT) DALAM KITAB MIKHA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL BAGI ORANG KRISTEN DI INDONESIA.” *EKKLESIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 2 (1): 83–101. <https://doi.org/10.63576/ekkleisia.v2i1.39>.

- Putra, Andreas Maurenis. 2024. "SEJUMLAH SKANDAL PEMIMPIN POLITIK DI INDONESIA: SIGNIFIKANSI TERHADAP KELUARAN 18: 21." *Track: Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi, dan Entrepreneurship* 03 (2): 3–30.
- Rangkang, Oktapianus, Afriatus Agus, Esron Mangatas Siregar, Sekolah Tinggi Teologi, and Makedonia Ngabang. 2025. "Prinsip Oikumenis Dan Keadilan Sosial: Analisis Berdasarkan Kitab Mikha 6:8." *ICHTUS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6 (1): 1–12. <https://doi.org/10.63830/HM2VRF15>.
- Silalahi, Bonnarty Steven. 2024. "Korupsi Ditinjau Dari Kitab Amsal." *Student Evangelical Journal Aiming At Theological Interpretation* 1 (2): 82–100. <https://doi.org/10.69668/sejati.v1i2.59>.
- Simundson, Daniel J, Joel Hosea, Obadiah Amos, and Micah Jonah. 2005. "Abingdon Old Testament Commentaries. Nashville." Abingdon Press.
- Sipahutar, Roy Charly. 2019. "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2 (2): 166–78. <https://doi.org/10.34307/b.v2i2.95>.
- Smith, R. 1984. *Word Biblical Commentary: Micah-Malachi*. Word Biblical Commentary. Word Books, Publisher.
- Tory, Tingka Febry, and Rizkia Amelia Hanum. 2025. *Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika*. 3.
- Walter Brueggemann. 2018. *The Prophetic Imagination*. Edited by Davis Hankins. Fortress Press.
- Waltke, B K. 2008. *A Commentary on Micah*. William B. Eerdmans Publishing Company.
- Wang, Yi. 2015. "Redemptive-Historical Hermeneutics and Applications." Westminster Seminary California.